

ABSTRAK

Pelaksanaan hak menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dilaksanakan atas dasar sistem *check and balances*, namun demikian putusan MK terkadang diragukan efektivitasnya karena ada kecenderungan tidak dipatuhi dan diabaikan oleh *addresat* putusan. Oleh karena itu dalam penulisan tesis ini, penulis membahas tentang *Kajian Hukum Terhadap Konsistensi Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimana model putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi ? dan bagaimana kekuatan mengikat dari putusan MK dalam putusan *judicial review* Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif, dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) pada dasarnya model merupakan model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma, akan tetapi kedua model putusan tersebut memuat atau mengandung adanya penafsiran (*interpretative decision*) terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang ataupun undang-undang secara keseluruhan yang pada dasarnya dinyatakan bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Model putusan yang menunda pemberlakuan putusannya (*limited constitutional*) pada dasarnya bertujuan untuk memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu. Model putusan yang lain yaitu yang merumuskan norma baru dalam rangka mengatasi inkonstitusionalitas penerapan norma. Inkonsistensi pada Putusan Nomor 072- 073/PUU- II/2004 mengkategorikan Pilkada langsung sebagai Pemilu dan sengketanya menjadi kewenangan MK, sedangkan Putusan Nomor 97/PUU.XI/2013 mengkategorikan Pilkada bukanlah Pemilu dan sengketanya bukanlah menjadi kewenangan MK. Perbedaan hasil penafsiran pada kedua putusan telah menunjukkan adanya Inkonsistensi Putusan yang dibuat oleh MK dalam memaknai pengertian Pilkada dan inkonsisten dalam memutuskan lembaga yang berwenang mengadili sengketa Pilkada. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa hal ini telah menunjukkan ketidak konsistenan MK dalam menafsirkan dan mengawal konstitusi, yang telah mencederai harapan besar akan tujuan dibentuknya lembaga konstitusional ini.

ABSTRACT

Research concerning model and implementation of Constitutional Court Verdicts in Judicial Review of Law against the 1945 Constitution constitutes juridical normative research using secondary data which is primary legal material namely Constitutional Court verdicts issued from 2003 until 2012. This research aimed at identifying decisions of which the dictum say it granted the petition submitted at the Court so that a comprehensive and integrative description of the model and implementation of Constitutional Court verdict can be found out. Article 56 Paragraph (3) and Article 57 Paragraph (1) of Law No. 24 Of 2003 as amended with Law No. 8 of 2011 on the Amendment of Law on Constitutional Court stipulate that in case a petition is granted, the Court will, at the same time, declares that a law is contradictory to the 1945 Constitution either wholly or partially and legally null and void since declared in an open court. Conditionally constitutional and conditionally unconstitutional verdict is basically a model of decisions which do not legally nullify and declare a norm null but these two models contain interpretation of a content of a paragraph, an article and/or part of a law or the whole part of a law which is basically declared contradictory or not contradictory to the Constitution and still have the force of law or do not have the force of law. A limited constitutional model of verdict which postpone an enforcement of a decision which basically aims at providing some time for transition of the provision which has been declared contradictory to the constitution to remain in force until a certain time in the future. Another model of verdict is a decision which formulate a new norm in order to cope with the unconstitutionality of implementation of a norm. This new norm is temporary in nature and will be included in the new law or revision of related law. Judicial review on the constitutionality of law is a check and balances mechanism by the Constitutional Court as the guardian of Constitution. Final and binding pattern in Constitutional Court's Verdict gave plenty correction to the unconstitutional law. As the guardian and the interpreter of constitution, Constitutional Court should give guarantee of rule of law nation could to stand erectly. Yhe facts is, some of Constitutional Court's Verdicts were seem full of controversy and exceed of its authority, one of them is the dispute of local government's election. Inconsistency of Constitutional Court's Verdict can be see when it runs judicial review on the constitutionality of law in dispute of local government's election context. In Verdict number 072-073/PUU-II/2004 Constitutional Court suggested that Constitutional Court have competence to sit in on judgement of dispute of local government's election, but in Verdict number 97/PUU.XI/2013 declared unjudge for that case no more.